

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 201-2019, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan analisis pertumbuhan, Arus kas Aktivitas Operasi 2017- 2018 mengalami pertumbuhan yang negatif, sedangkan tahun 2018-2019 menunjukkan pertumbuhan positif. Arus kas dari aktivitas investasi tahun 2017-2019 menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2017 dan 2019 mengalami pertumbuhan yang negatif, sedangkan tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang positif .
2. Berdasarkan analisis perkomponen, dapat dilihat bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2017-2019 bersaldo positif, namun Pemerintah Daerah Provinsi NTT belum memiliki kemandirian keuangan yang tetap yang terlihat dari komposisi arus kas masuk dari dana transfer yang sangat besar dibandingkan dengan PAD. Pada aktivitas investasi bersaldo negatif yang menunjukkan Pemerintah Daerah Provinsi NTT aktif melakukan pembangunan fisik dan penambahan aset tetap. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2017 dan 2019 bersaldo negatif, hal ini mengindikasikan terjadinya surplus anggaran sehingga kelebihan dana tersebut digunakan untuk pengeluaran pembiayaan dan Saldo positif tahun

2018 tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa pada tahun tersebut Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah menggunakan instrumen pembiayaan daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan.

3. Berdasarkan analisis arus kas bebas, terlihat bahwa saldo arus kas bebas menunjukkan saldo positif terjadi pada tahun 2017 dan 2019 sedangkan pada tahun 2018 bersaldo negatif, hal ini menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT pada tahun 2018 menurun.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTT, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan arus kas bersih dan mengurangi tingkat ketergantungan yang tinggi dari Pemerintah Daerah Provinsi NTT terhadap pemerintah pusat maka Pemerintah Daerah Provinsi NTT perlu mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari PAD dan melakukan efisiensi belanja.
2. Untuk arus kas bebas, Pemerintah perlu meningkatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk membiayai sendiri belanja modal berupa pembangunan fisik dan penambahan aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2011. *“Sistem Akuntansi Sektor Publik”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baridwan, Zaki. 2014. *“Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPF
- Florina Banggut. 2013. Analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009-2011. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Halim, Abdul. 2012. *“Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *“Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)”*. Jakarta: IAI.
- Ihyaul Ulum. 2004. *“Pengantar Akuntansi Sektor Publik”*. UMM Press: Malang.
- Kusnadi. 2018. *“Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Meldiana Setia. 2014. *“Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2009-2011”*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *“Standar Akuntansi Pemerintahan”*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang *“Pengelolaan Keuangan Daerah”*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *“Standar Akuntansi Pemerintahan”*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *“Pengelolaan Keuangan Daerah”*.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *“Pengelolaan Keuangan Daerah”*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang *“Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah”*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang *“Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas”*.

Rudianto. 2012. *“Pengantar Akuntansi dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan”*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sutrisno. 2008. *“Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi Edisi 1”*. Yogyakarta: Ekonisia.

Toto, Prihadi. 2011. *“Analisis Laporan Keuangan Teori dan Aplikasi”*. Jakarta: PPM.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *“Pemerintah Daerah”*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *“Pemerintah Daerah”*.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *“Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”*.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang *“Keuangan Negara”*.